

SKRIPSI

PERAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK DI ERA DIGITAL

(STUDI PERBANDINGAN INDONESIA, SINGAPURA, KOREA SELATAN

DAN FINLANDIA)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Oleh:

DIVA WARDAH ANAZIAH

2210111094

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK V)



Dosen Pembimbing:

Arfiani, S.H.,M.H

Beni Kharisma Arrasuli S.HI.,LLM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No. Reg : 07/PKV/IV/2026

PERAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK DI ERA DIGITAL (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA, SINGAPURA, KOREA SELATAN, DAN FINLANDIA)

Diva Wardah Anaziah, 2210111094, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program
Kekhususan Hukum Tata Negara (PK V), 96 Halaman, Tahun 2026

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membuka ruang baru bagi ancaman terhadap hak anak, mulai dari *cyberbullying*, eksploitasi seksual daring, pelanggaran privasi data, hingga kecanduan teknologi. Kondisi ini menuntut negara untuk menjalankan kewajiban konstitusional dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak melalui sistem perlindungan hukum yang efektif. Penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah, yaitu *Pertama* bagaimana peran serta tanggung jawab negara dalam perlindungan hak anak di era digital di Indonesia, Singapura, Korea Selatan, dan Finlandia?, *Kedua* bagaimana efektivitas mekanisme perlindungan hak anak pada era digital di negara Indonesia, Singapura, Korea Selatan, dan Finlandia? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama* peran dan tanggung jawab negara dalam perlindungan hak anak di era digital di Indonesia, Singapura, Korea Selatan, dan Finlandia telah diwujudkan melalui pembentukan kelembagaan, regulasi, serta kebijakan yang berbeda sesuai karakteristik sistem hukum masing-masing negara. Singapura dan Korea Selatan menunjukkan perlindungan yang efektif melalui regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang konsisten serta Finlandia memiliki sistem yang paling efektif karena didukung oleh regulasi yang komprehensif, literasi digital yang baik, dan kerja sama berbagai pihak dalam melindungi hak anak. *Kedua* efektivitas perlindungan hak anak di era digital ditentukan oleh keseimbangan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum suatu negara. Finlandia sebagai negara yang memiliki sistem perlindungan yang paling efektif, diikuti oleh Korea Selatan dan Singapura, sedangkan Indonesia masih perlu memperkuat koordinasi antarlembaga, penyempurnaan regulasi, dan literasi digital masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi kelembagaan, harmonisasi regulasi, serta peningkatan literasi digital melalui kerja sama antara pemerintah, keluarga, sekolah, masyarakat, dan penyelenggara platform digital.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Anak, Era Digital, Peran Negara, Perbandingan Hukum, Hak Asasi Manusia.

**THE ROLE OF THE STATE IN PROTECTING CHILDREN'S RIGHTS IN THE
DIGITAL AGE (A COMPARATIVE STUDY OF INDONESIA, SINGAPORE,
SOUTH KOREA, AND FINLAND)**

*Diva Wardah Anaziah, 2210111094, Faculty of Law, Universitas Andalas,
Constitutional Law Specialization (PK V), 96 Pages, 2026*

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has opened up new avenues for threats to children's rights, ranging from cyberbullying, online sexual exploitation, and data privacy violations to technology addiction. This situation requires the state to fulfill its constitutional obligation to respect, protect, and fulfill children's rights through an effective legal protection system. This study examines two research questions: First, what are the role and responsibilities of the state in protecting children's rights in the digital age in Indonesia, Singapore, South Korea, and Finland? Second, how effective are the mechanisms for protecting children's rights in the digital age in Indonesia, Singapore, South Korea, and Finland? This study employs a normative legal research method using three approaches: the statutory approach, the conceptual approach, and the comparative approach. Legal materials were collected through document analysis and analyzed using a qualitative-normative approach. The results of the study indicate that: First, the role and responsibility of the state in protecting children's rights in the digital age in Indonesia, Singapore, South Korea, and Finland have been realized through the establishment of institutions, regulations, and policies that differ according to the characteristics of each country's legal system. Singapore and South Korea demonstrate effective protection through clear regulations and consistent law enforcement, while Finland has the most effective system because it is supported by comprehensive regulations, good digital literacy, and collaboration among various parties in protecting children's rights. Second, the effectiveness of children's rights protection in the digital age is determined by the balance between a country's legal structure, legal substance, and legal culture. Finland has the most effective protection system, followed by South Korea and Singapore, while Indonesia still needs to strengthen inter-agency coordination, refine regulations, and improve public digital literacy. This study recommends strengthening institutional coordination, harmonizing regulations, and enhancing digital literacy through collaboration among the government, families, schools, the community, and digital platform providers.

Keywords: *Children's Rights Protection, Digital Age, Role of the State, Comparative Law, Human Rights.*